

Abstrak

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan adalah ketidakselarasan aturan antara satu sama lain. UU No. 13 Tahun 1998 merupakan dasar hukum bagi lansia agar tidak diperlakukan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memberikan ruang untuk melakukan aktivitas produktif guna menghasilkan barang dan/atau jasa agar tercapainya kesejahteraan secara mandiri. Lansia mempunyai hak untuk bekerja atau diperkerjakan dibidang formal maupun informal sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 1998. Akan tetapi, adanya pengaturan tindak pidana perdagangan orang menjadi penghambat tercapainya kesejahteraan lansia secara mandiri terutama Pasal 2 ayat 1 UU TPPO memiliki rumusan unsur tindak pidana panjang serta tidak diberikan batasan dalam menerjemahkannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi atas disharmoni Pasal 2 ayat 1 UU TPPO dengan UU No. 13 Tahun 1998 dan mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan lansia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan unsur Pasal 2 ayat 1 UU TPPO memiliki penafsiran yang luas dan berdampak pada setiap orang yang memperkerjakan lansia dapat dikenakan sanksi pidana perdagangan orang karena telah memenuhi dua unsur utama yaitu unsur perbuatan meliputi merekrut atau mengajak dan unsur cara seperti menyalagunakan kekuasaan atau posisi rentan. Lansia yang diberikan jaminan atas hak dalam UU No. 13 Tahun 1998 untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri menjadi terhambat karena setiap orang yang ingin mengajak lansia melakukan kegiatan produktif diambang suatu ketakutan bagi diri mereka. Oleh sebab itu, pengaturan terhadap lansia seharusnya menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang berubah begitu massif agar tercapainya kesejahteraan lansia.

Kata kunci: tppo-kesejahteraan-lanjut usia

Abstract

Disharmonization of laws and regulations is the inconsistency of the rules with each other. UU no. 13 of 1998 is the legal basis for the elderly so that they are not treated discriminatorily in social, national and state life by providing space to carry out productive activities to produce goods and/or services in order to achieve independent prosperity. Elderly people have the right to work or be employed in formal and informal fields as stated in Article 5 of Law no. 13 of 1998. However, the existence of regulations on the criminal act of trafficking in persons is an obstacle to achieving the welfare of the elderly independently, especially Article 2 paragraph 1 of the TPPO Law which has a long formulation of the elements of a criminal act and there are no restrictions in translating it. This research was conducted to determine the implications of the disharmony of Article 2 paragraph 1 of the TPPO Law with Law no. 13 of 1998 and know how the elderly should be managed.

The research method used is normative juridical. The approach used is a conceptual approach.

The results of this research show that the formulation of the elements of Article 2 paragraph 1 of the TIP Law has a broad interpretation and has an impact on every person who employs the elderly can be subject to criminal sanctions for trafficking in persons because they have fulfilled two main elements, namely the act element including recruiting or inviting and the method element such as abusing power. or vulnerable position. Elderly people who are guaranteed their rights in Law no. 13 of 1998 to achieve prosperity independently is hampered because everyone who wants to encourage the elderly to carry out productive activities is on the verge of fear for themselves. Therefore, regulations for the elderly should adapt to the dynamics of community life which are changing massively in order to achieve the welfare of the elderly.

Keywords: tppo-welfare-elderly